

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2021

[Grab your reader's attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point. To place this text box

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

anywhere on the page, just drag it.]

JL. Cut Nyak Dien III Pekanbaru
Telp (0761) 39973-23810, Fax (0761) 39973
website: <http://dinkes.riau.go.id>, email



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN 2019
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR :

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 2
1.3	Maksud dan Tujuan 4
1.4	Sistematika Penulisan..... 5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 16
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 18
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 27
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 28
3.3	Program dan Kegiatan..... 29
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32
	4.1 Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP 38
5.1	Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian..... 38
5.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 39
5.3	Rencana Tindak Lanjut..... 39
LAMPIRAN	HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2021

Daftar Tabel

Tabel T.C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Reja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	15
Tabel T.C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.....	17
Tabel T.C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Riau.....	23
Tabel T.C 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Riau.....	25
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan target Visi dan Misi Gubernur Riau Tahun 2021.....	28
Tabel T.C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau.....	31
Tabel 4.1	Daftar Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Renja Perangkat Daerah menggambarkan target-target pencapaian berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan menginventarisir kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Salah satu cara yang diambil untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam Rapat Kordinasi (Rakor), yang melibatkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Disamping menyerap aspirasi dari pendekatan yang diuraikan diatas, juga dengan memperhatikan tuntutan yang muncul pada masyarakat seiring dengan kemajuan dan teknologi informasi dewasa ini.

Hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Provinsi sehingga terlihat benang merah pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD dengan langkah-langkah pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau disamping sebagai dokumen perencanaan, juga merupakan dokumen awal dalam tahapan penyusunan anggaran pembangunan. Dengan kata lain Renja Perangkat Daerah adalah tahapan permulaan didalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Dokumen tersebut diatas merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara No. 4438);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Riau;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005 – 2025;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 -2024;
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
23. Peraturan Gubernur Riau No 43 Tahun 2020 tentang RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
24. Peraturan Gubernur Riau No. 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan di bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

b. Tujuan

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau hingga tahun 2020;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2021 dan prakiraan tahun 2022.
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2021.
4. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 di lingkup

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Riau Tahun

2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah-Kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan pada Dinas Kesehatan tersebut termasuk untuk 3 (tiga) UPT, yaitu UPT Bapelkes, UPT Labkesling dan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan. Anggaran tersebut untuk membiayai 17 Program urusan wajib sebagai berikut:

Realisasi Penyerapan Dana APBD Tahun 2019 Per Program

No	PROGRAM	PAGU APBD	PENYERAPAN	%
A.	Belanja Tidak Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp. 45.287.605.267	Rp. 41.702.222.454	92.8
2.	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 18.242.042.802		
3.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 27.045.562.465		
B.	Belanja Langsung			
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 5.008.927.278	Rp. 4.125.498.234	82.36
2	Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.670.743.750	Rp. 1.355.000.374	94.93
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 167.247.498	Rp. 158.765.000	94.93
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 358.680.00	Rp. 217.183.925	60.55
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 327.672.400	Rp. 291.064.800	88.82
6	Program : Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 876.925.875	Rp. 777.263.015	88.63

7	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 6.125.143.065	Rp. 4.862.173.069	79.38
8	Program : Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 4.855.712.360	Rp. 4.053.067.536	83.47
9	Program : Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 645.261.300	Rp. 488.429.600	75.69
10	Program : Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 681.321.000	Rp. 611.910.629	89.81
11	Program : Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 2.972.300.300	Rp. 2.361.196.596	79.44
12	Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 165.158.000	Rp. 119.127.600	72.13
13	Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/	Rp. 22.653.392.993	Rp. 18.970.070.036.90	83.74
14	Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Rp. 904.810.705	Rp. 817.268.400	90.32
15	Program : Pelayanan Instalasi Farmasi Dan Logistik Kesehatan	Rp. 11.076.570.053	Rp. 10.113.406.437	91.30
16	Program : Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Rp. 386.936.725	Rp. 358.543.700	92.66
17	Program : Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	Rp. 6.589.443.690	Rp. 6.410.719.899	97.29
18	Program : Manajemen Dan Informasi Kesehatan	Rp. 3.448.937.000	Rp. 2.922.436.784	84.73
19	Program : Diklat Dan Pelatihan Kesehatan	Rp. 4.633.966.791	Rp. 3.379.344.942	72.93
20	Program : Penanggulangan Krisis Kesehatan	Rp. 1.556.755.270	Rp. 784.597.225	50.40
21	Program : Pelayanan Laboratorium Klinis Dan Lingkungan	Rp. 18.714.316.275	Rp. 13.372.650.702	71.46
22	Program : Pembiayaan Kesehatan	Rp. 115.776.816.258	Rp. 95.104.334.168	82.14

Tahun 2019 pagu yang tersedia untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 254.884.643.853.00 dan terealisasi sebesar Rp. 213.356.274.126, dengan persentase fisik (95,565) dan keuangan (83,71%).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang mencapai keberhasilan baik fisik maupun keuangan maka dari itu akan dirincikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi;
- Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA;
- Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional;
- Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional;
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan;
- Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONEB;
- Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi (BOK) - (DAK);
- Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat;
- Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS;
- Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian Malaria;
- Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI;
- Pengendalian Penyakit ISPA;
- Pengendalian Penyakit Diare;
- Survey Kusta Frambusia;
- Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB);
- Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu;
- Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi;
- Pengadaan Obat Program;
- Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan TK Provinsi;
- Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;
- Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau;

- Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock;
- Pembinaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyimpanan Obat dan Vaksin;
- Sistem Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Farmasi dan Logistik (SIFIT);
- Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM);
- Peningkatan surveilans penyakit tidak menular;
- Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan;
- Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan;
- Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT. Balai Pelatihan Kesehatan;
- Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Prasarana Di Balai Pelatihan Kesehatan Daerah (DAK);
- Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim;
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling;
- Pembangunan Lanjutan RS Provinsi (Yang Belum Operasional) Dan Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi (DAK);
- Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan;
- Penyediaan Biaya Jamkesda;
- Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan;
- Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki JKN/KIS;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

- Penyediaan Makanan Dan Minuman;
- Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset;
- Penyediaan Sarana Kearsipan;
- Pendidikan Dan Pelatihan Formal;
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- Pelaporan Barang Milik Daerah;
- Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD;
- Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK Provinsi Riau;
- Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN);
- Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Penobatan Tradisional (SP3T);
- Peningkatan Pengelolaan Manajemen FKTP Tingkat Provinsi;
- Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi FKTP Tingkat Provinsi;
- Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
- Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan;
- Penanggulangan Masalah Gizi;
- Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi;
- Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronis (PMT Bumil KEK - Pabrikan) (DAK);
- Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas;
- Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM;
- Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum (TTU);
- Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes;
- Pengendalian Tempat Pengelolaan Makanan (TPM);
- Advokasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML;
- Peningkatan Program Kesehatan Haji;
- Peningkatan Kapasitas dan Cakupan Dalam Pengendalian Tuberkulosis (TB);
- Pengendalian Penyakit Menular DBD;
- Pengendalian Hepatitis Virus;
- Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (STP);
- Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
- Pengelolaan Kesehatan Matra
- Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi;
- Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi;
- Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB;
- Peningkatan Pelayanan Pengendalian TB Resisten Obat;
- Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau;
- Intensifikasi Penemuan Kasus TB;
- Pengendalian Kecacangan;
- Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan Pemerintah/Swasta se- Provinsi Riau;
- Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan Pemerintah/Swasta se- Provinsi Riau;
- Pengelolaan Data Sarana Kesehatan;
- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;
- Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak;
- Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita);
- Penanggulangan Masalah/Kasus Kesehatan Ibu;
- Penilaian Instalasi Farmasi dan Tenaga Kefarmasian Berprestasi di Provinsi Riau;
- Pengadaan Logistik Program;
- Pembangunan Baru/Rehabilitasi Dan Atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (DAK);
- Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT Provinsi Riau;
- Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD;

- Pengembangan Bank Data dan Informasi;
- Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau;
- Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah);
- Evaluasi Program Kesehatan di Provinsi Riau;
- Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- Evaluasi Pasca Pelatihan;
- Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja Kesehatan Provinsi Riau;
- Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling;
- Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling;
- Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Labkesling;
- Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk program dan kegiatan yang melebihi target kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau belum ada, ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi pengurangan pagu anggaran, sehingga ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- ✚ Keterlambatan dalam Penetapan KPA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- ✚ Masih lemahnya dukungan anggaran dan disertai adanya rasionalisasi anggaran pada setiap tahunnya.
- ✚ Kondisi lingkungan mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja
- ✚ Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah.
- ✚ Meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan.

Target capaian kinerja yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019.

Meski masih ada masalah dalam mencapai target tersebut ini dikarenakan beberapa faktor dan salah satunya adanya pengurangan atau rasionalisasi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam RKPD sebelumnya. Dengan adanya rasionalisasi target yang semula tercantum tinggi tidak diturunkan seiring dengan adanya pengurangan anggaran. Dan ini menyebabkan capaian realisasi pada sebagian kegiatan tidak bisa mencapai target. Terkadang program dan kegiatan ini bersentuhan dengan pelayanan kesehatan misalnya : pelayanan pendamping minum obat pada pasien TB, pelayanan kesehatan pada pelayanan penyakit tidak menular. Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019 telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Tahun 2019, selanjutnya dalam APBD Tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 22 program dan 127 kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel T.C 29.

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renda Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
0		Non Urusan											
0	0	NON URUSAN											
0	0	1											
0.00	00	001	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	13900 surat	74	4.700	4.325	92,02	4.700	9.099	65,46
0.00	00	001	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 bulan	46	12	12	100	12	70,00	116,67
0.00	00	001	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 unit	32	6	6	100	6	44,00	73,33
0.00	00	001	0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas opearsonal/ operasional yang dipelihara	60 unit	36	9	9	100	9	54,00	90,00
0.00	00	001	0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	48	12	12	100	12	72,00	120,00
0.00	00	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	48	12	12	100	12	72,00	120,00
0.00	00	001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	46	12	12	100	12	70,00	116,67
0.00	00	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	48	12	12	100	12	72,00	120,00
0.00	00	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	60 bulan	45	12	12	100	12	69,00	115,00
0.00	00	001	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	23000 porsi	11,85	5.500	5.500	100	5.500	11.012	47,88

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
0.00	00	005	0001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	136 orang	58	35	25	71	35	118,00	86,76
0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-							-	#DIV/0!
0.00	00	006	0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Dokumen	3	1	1	100	1	5	100,00
0.00	00	006	0005	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau	10 Dokumen	1	2	2	100	2	5	50,00
0.00	00	006	028	Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang disusun	5 Laporan	4	1	1	100	1	6	120,00
0.00	00	006	030	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang dimanfaatkan	5 dokumen	0	1	1	100	1	2	40,00
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN								-	#DIV/0!
1.01	2			KESEHATAN								-	#DIV/0!
1.01	2	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	-							-	#DIV/0!
1.01	02	15	019	Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional sesuai target	12 Kab/Kota	32	12	12	100	12	55,70	464,17
1.01	02	15	020	Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan penyalahgunaan NAPZA	266 RS dan IPW	59	62	58	94	62	179,00	67,29
1.01	02	15	021	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional	jumlah sarana distribusi obat, alkes, kosmetik, makanan minuman dan obat tradisional yang sesuai standar	1235 sarana	194	270	264	98	270	728,00	58,95
1.01	02	15	022	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional	Persentase Penggunaan Obat rasional di Fasyankes Dasar Pemerintah	85 %	183	85	81	96	85	349,67	411,38

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	02	22	014	Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS	Prevalensi HIV/ADIS	<0,5 %	12,20	0,50	0,42	84,00	0,50	13	#VALUE!
1.01	02	22	016	Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian Malaria	Persentase kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	40 %	88	40	32	79	40	160	399,63
1.01	02	22	025	Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML	Jumlah paket logistik penunjang operasional program P2 TB HIV/AIDS, diare dan kusta yang dimanfaatkan	5 Paket	2	1	1	100	1	4	80,00
1.01	02	22	029	Peningkatan Program Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional di kab/kota	95 %	141	95	95	100	95	331	348,11
1.01	02	22	034	Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	86 %	16,07	86,00	85,59	99,52	86,00	188	218,21
1.01	02	22	038	Peningkatan Kapasitas dan Cakupan Dalam Pengendalian Tuberkulosis (TB)	Persentase Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes rate) minimal 85%	76 Persentase	0	76,00	75,93	100	76,0	152	199,91
1.01	02	22	043	Pengendalian Penyakit Menular DBD	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	46 per 100.000 penduduk	172	46	33	72	46	251	545,43
1.01	02	22	044	Pengendalian Penyakit ISPA	Persentase kab/Kota yang meningkat program ISPA	50 %	47	50	46	92	50	143	286,00
1.01	02	22	045	Pengendalian Penyakit Diare	Persentase kab/Kota yang meningkat program Diare	50 %	238	50	46	92	50	334	668,20
1.01	02	22	046	Pengendalian Hepatitis Virus	jumlah kab/kota yang terisolasi Hepatitis virus	36 kab/kota	23	12	12	100	12	47	130,56
1.01	02	22	047	Survey Kusta Frambusia	Jumlah kab/kota yang diketahui situasi dan kondisi terkini pengendalian penyakit kusta	2 kab/kota	3	12	11	92	12	26	1300,00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan															
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)														
1				2				3				4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.01	02	22	049	Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Persentase Kab/kota yang melakukan pemetaan STP	80 %	17	80	80	100	80	177	221,13														
1.01	02	22	050	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	(1) Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. (2) Discharger/Eliminasi Campak	10 /100.000 Penduduk	11	2	2	100	2	15	150,10														
1.01	02	22	054	Pengelolaan Kesehatan Matra	Persentase situasi matra di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	95 %	136	95	95	100	95	326	343,35														
1.01	02	22	056	Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	94 %	68	94	94	100	94	256	272,35														
1.01	02	22	058	Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi	Jumlah paket sarana pendukung imunisasi yang diadakan	94 paket	9	3	3	100	3	15	15,96														
1.01	02	22	060	Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke Fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %	44	100	88	88	100	232	231,68														
1.01	02	22	061	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Persentase alert yang direspon oleh kabupaten/kota	85 %	85	85	85	100	85	255	299,74														
1.01	02	22	062	Peningkatan Pelayanan Pengendalian TB Resisten Obat	Angka TB-MDR	<4 < % dari kasus TB	12	4	4	100	4	20	#VALUE!														
1.01	02	22	063	Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	95 %	0	95	95	100,00	95	#VALUE!	#VALUE!														
1.01	02	22	064	Intensifikasi Penemuan Kasus TB	Jumlah kab/Kota dengan tenaga terlatih dan terampil dalam penemuan secara dini pasien TB.	24 kab/kota	11	12	12	100	12	35	145,83														
1.01	02	22	065	Pengendalian Kecacingan	Terlaksananya Pengendalian Kecacingan di Kab/Kota non endemis filariasis dan di kab/kota pasca POPM Filariasis	6 kab/kota	2	4	4	100	4	10	158,33														

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1.01	02	34	0001	Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi	Persentase obat Bufferstok yang tersedia di Prov. Riau	90 %	182	90	90	100	90	361	401,47	
1.01	02	34	0002	Pengadaan Obat Program	Persentase ketersediaan obat program	90 %	187	90	89	98	90	366	406,36	
1.01	02	34	0003	Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan TK Provinsi	Persentase kebutuhan obat, vaksin, BMHP dan Alkes di Provinsi Riau	90 %	88	90	85	94	90	263	292,17	
1.01	02	34	0008	Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	88 %	12	78	75	96	78	165	187,58	
1.01	02	34	009	Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	persentase Kepuasan terhadap mutu pelayanan UPT. IFLK di provinsi Riau	90 %	94	90	78	87	90	263	291,78	
1.01	02	34	012	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock	Persentase Tersedianya BMHP dan Alkes Buffer Stock Diprovinsi Riau	75 %	28	78	77	98	78	182	243,17	
1.01	02	34	015	Penilaian Instalasi Farmasi dan Tenaga Kefarmasian Berprestasi di Provinsi Riau	Jumlah Instalasi Farmasi yang berprestasi di Prov. Riau dan Jumlah Tenaga Kefarmasian yang berprestasi di Prov. Riau	15	Instalasi dan Petugas	15	3	3	100	3	21	139,73
1.01	02	34	016	Pembinaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyimpanan Obat dan Vaksin	Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan pembinaan	80 %	8	90	85	95	90	183	229,31	
1.01	02	34	017	Sistem Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Farmasi dan Logistik (SIFIT)	Persentase data ketersediaan obat di provinsi riau	70 %	51	93	70	100	70	191	272,30	
1.01	02	34	020	Pengadaan Logistik Program	Persentase tersedianya penunjang logistik program di Provinsi Riau	93 persen	0	93	93	100	93	186	200,00	

Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
1.01	02	34	021.	Pembangunan Baru/Rehabilitasi Dan Atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)	Terlaksananya rehan gedung UPT. IFK dan Logistik kesehatan	1	Kegiatan	0	1	1	100	1	2	200,00
1,01	2	35		Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	-									#DIV/0!
1.01	02	35	0001	Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	Persentase FKTP Milik Pemerintah yang melaksanakan pengendalian PTM sesuai standart (Hipertensi, Diabetes, keswa, Rokok)	60	%	40	60	58	96	60	158	262,85
1.01	02	35	0004	Peningkatan surveilans penyakit tidak menular	Persentase kab/kota yang meningkat surveilans PTMnya	60	%	56	60	57	96	60	173	289,12
1,01	2	36		Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	-									#DIV/0!
1.01	02	36	0002	Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT Provinsi Riau	Jumlah Paramedis PTT yang diterima	191	Orang	800	200	200	100	200	1.200	628,27
1.01	02	36	0006	Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau	Persentase Pemohon STR yang diusulkan ke MTKP	100	%	364	100	100	100	100	564	564,37
1.01	02	36	0007	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Kab/kota yang ditingkatkan kompetensi SDM Kesehatannya	36	kab/ko ta	110	12	12	100	12	134	371,86
1,01	2	37		Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan	-									#DIV/0!
1.01	02	37	0002	Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	10	Doku men	8	2	2	100	2	12	120,00
1.01	02	37	0006	Pengembangan Bank Data dan Informasi	Persentase Bidang/UPT dan seksi yang tersedia data kesehatan yang terintegasi	100	%	201	100	100	100	100	401	401,00
1.01	02	37	0007	Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	65	dokum en	41	13	13	100	13	67	103,38

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1.01	02	37	0008	Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan se-Provinsi riau	Persentase Kepala Dinas dan Direktur RS di Provinsi Riau yang mengikuti forum kepala dinas se-provinsi Riau	100 %	145	100	-	0	100	245	245,24
1.01	02	37	011	Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Dokumen kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Provinsi Riau	100 %	155	100	90	90	100	345	345,00
1.01	02	37	012	Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah)	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	5 dokumen	303	1	1	100	1	305	6100,00
1.01	02	37	013	Evaluasi Program Kesehatan di Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang terevaluasi kegiatan bersumber APBN/APBD prov Riau	100 %	232	100	100	100	100	432	431,79
1.01	02	37	014	Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase FKTP Milik Pemerintah yang terintegrasi yang menggunakan SIKDA Generik	65 %	49	65	59	90	65	173	265,38
1.01	02	37	015	Pengadaan Infrastruktur Sistem Infomasi Kesehatan (SIK)	Jumlah Paket Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	5 paket	10	1	1	100	1	12	235,00
1.01	2	38		Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan	-								#DIV/0!
1.01	02	38	0002	Evaluasi Pasca Pelatihan	Persentase peserta yang menerapkan hasil pelatihan sesuai standar	85 %	75	85	85	100	85	245	288,24
1.01	02	38	0007	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	1200 orang	13	400	364	91	400	777	64,77
1.01	02	38	010	Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	10 jenis	0	2	2	100	2	4	40,00
1.01	02	38	012	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT. Balai Pelatihan Kesehatan	Persentase realisasi kebutuhan rutin dan operasional serta pemeliharaan UPT Bapelkes	100 persen	0	100	95	95	100	195	195,00

Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
1.01	02	38	013.	Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Prasarana Di Balai Pelatihan Kesehatan Daerah (DAK)	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana di balai Pelatihan Kesehatan Daerah (DAK)	0	1	0	100	84	84	100	184	#DIV/0!
1,01	2	39		Program Penanggulangan Krisis Kesehatan	-									#DIV/0!
1.01	02	39	0002	Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Persentase Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim yang direspon dalam waktu < 24 jam	80	%	275	80	78	98	80	433	541,26
1.01	02	39	0006	Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan	rentang waktu tersedianya dana pelayanan penanggulangan krisis kesehatan	60	bulan	0	12	12	100	12	24	40,00
1,01	2	40		Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan	-									#DIV/0!
1.01	02	40	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling	Rentang waktu pemeriksaan di UPT Laboratorium Kesehatan	60	Bulan	44	12	12	100	12	68	113,33
1.01	02	40	0002	Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling	Jumlah Paket Bahan Laboratorium Klinis dan Lingkungan yang diadakan	5	Paket	3	1	1	100	1	5	101,60
1.01	02	40	0003	Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Labkesling	Jumlah Peralatan Laboratorium Yang Diadakan	5	paket	13	1	1	100	1	15	300,00
1.01	02	40	0004	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling	Jumlah personil yang terlatih dalam rangka pelayanan UPT Labkesling	20	Orang	24	20	17	85	20	61	305,00
1.01	02	40	0006.	Pembangunan Lanjutan Rs Provinsi (Yang Belum Operasional) Dan Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi (DAK)	Persentase Persyaratan Akreditasi Laboratorium Yang Terpenuhi Sesuai Standar	0	1	0	100	41	41	100	141	#DIV/0!
1,01	2	41		Program Pembiayaan Kesehatan	-									#DIV/0!
1.01	02	41	0001	Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	90	%	138	90	85	95	90	313	348,14

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	02	41	0002	Penyediaan Biaya Jamkesda	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu diluar kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang	90 %	110	90	88	98	90	288	320,22
1.01	02	41	0004	Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan	Persentase kab/kota melaksanakan manajemen pembiayaan kesehatan dengan baik dan benar	90 %	106	90	90	100	90	286	317,60
1.01	02	41	0005	Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	5 Dokumen	4	1	1	100	1	6	120,00
1.01	02	41	0006	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki JKN/KIS	persentase Masyarakat Miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang didaftarkan kedalam	90 %	226	90	86	96	90	402	447,11

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan kesehatan.

Dalam kerangka urusan ini Dinas Kesehatan Provinsi Riau memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya maupun pelayanan kesehatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dapat dilihat berdasarkan **Tabel T-C. 30 sebagai berikut :**

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2019 Tahun (n-2)	Target 2020 Tahun (n-1)	Target 2021 Tahun (n)	Target 2022 Tahun (n+1)	2019 Tahun (n-2)	2020 Tahun (n-1)	Target 2021 Tahun (n)	Target 2022 Tahun (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan			75	100	100	100	39,01	100	100	100	Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
2	(1) Pesentase Capaian Indikator Kinerja FKTL sesuai standar			0	45	55	65	45	45	55	65	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2020 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(2) Persentase FKTP sesuai standar			0	100	100	100	100	100	100	100	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(3) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana			0	100	100	100	100	100	100	100	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(4) Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan			0	100	100	100	100	100	100	100	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(5) Persentase Kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium			0	60	65	70		60	65	70	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
3	(1) Persentase ODHA yang diobati			90	23	28	33	13,2	23	28	33	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(2) Success Rate TB Paru			95	90	90	90	87	90	90	90	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(3) Annual Parasit Inciden (API) / Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk			< 1/1000 PDDK	< 1/1000 PDDK	< 1/1000 PDDK	< 1/1000 PDDK	< 1/1000 PDDK	< 1/1000 PDDK	< 1/1000 PDDK	< 1/1000 PDDK	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(4) Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan			93	93	93	94	81	93	93	94	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(5) Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%			100	100	100	100	100	100	100	100	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(6) Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			0	60	70	80	60	60	70	80	Target 2019 blm bisa dihitung krn DO baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target

	(7) Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			0	60	70	80	60	60	70	80	Target 2019 blm bisa dihitung km DO baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
4	Persentase fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar			0	65	67	70	65	65	67	70	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	Persentase kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium			0	60	65	70	60	60	65	70	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
5	1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)			0	80	85	90	80	80	85	90	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	2. Kunjungan Antenatal (K4) (%)			0	92	94	96	92	92	94	96	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	3. Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)			0	92	94	96	92	92	94	96	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita			0	25	24	22	25	25	24	22	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
6	(1). Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar			0	56	61	68	56	56	61	68	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(2). Persentase sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alkes memenuhi standar			0	58	60	63	58	58	60	63	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	(3). Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan logistik di Provinsi Riau			0	99	100	100	99	99	100	100	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
7	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai Kompetensi Sesuai Standar			0	45	60	75	45	45	60	75	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target
	Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar			0	100	100	100	100	100	100	100	Target 2019 menggunakan nomenklatur baru Realisasi 2019 dan Proyeksi 2021 -2022 menggunakan angka target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Riau, **permasalahan** yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi
- 2) Masih dijumpainya kasus gizi buruk di beberapa kabupaten/kota
- 3) Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover dalam penerima bantuan iuran (PBI). Peningkatan risiko penyakit tidak menular
- 4) Banyaknya institusi yang menciptakan lulusan tenaga kesehatan yang belum kompeten
- 5) Standarisasi dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum terpenuhi
- 6) Dukungan anggaran di kabupaten/kota dan provinsi masih banyak dimanfaatkan untuk kuratif dan rehabilitatif
- 7) Regionalisasi sistem rujukan kesehatan belum berjalan optimal
- 8) Regulasi di bidang kesehatan tingkat provinsi belum memadai
- 9) Dukungan pembangunan kesehatan dari lintas sektor belum optimal
- 10) Terbatasnya sarana dan prasarana perawatan pasien jiwa di puskesmas

Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani, seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, dan malaria, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian. Hal-hal tersebut, di antaranya yakni kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); penyalahgunaan narkotika dan alkohol; kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; asuransi kesehatan umum kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan. Bila kita dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah kita susun bersama maka dengan sendirinya target-target yang terdapat dalam SDGs akan dapat kita penuhi. Ada delapan *goals* sebenarnya yang tercapai sebelumnya, seperti prevalensi malaria, penanggulangan tuberkulosis, dan akses air minum layak perkotaan. Selain itu, ada 17 indikator yang menunjukkan perkembangan positif, seperti penurunan balita kurang gizi, Angka Kematian Ibu Anak, dan sebagainya. Ke delapan, *goals*-nya adalah meningkatkan kesejahteraan Sedangkan kedelapan perhatian baru mencakup:

1. Beban Ganda Gizi
2. Arah perbaikan gizi pada solusi berkelanjutan, yaitu integrasi dengan peningkatan akses pangan dan produksi pertanian
3. Kematian akibat penyakit tidak menular (hipertensi, stroke, diabetes, jantung, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya).
4. Penyalahgunaan narkotika dan alcohol
5. Kematian dan cedera kecelakaan lalu lintas
6. Universal Health Coverage (UHC)
7. Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah
8. Penanganan krisis dan kegawatdaruratan

Tantangan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Hingga saat ini, seluruh unsur yang terlibat dalam sektor kesehatan telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, namun masalah kesehatan tidak menjadi tanggung jawab tunggal sektor kesehatan, banyak sektor lain yang diperlukan keterlibatannya dalam ikut menjaga dan mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat, antara lain sektor Pendidikan, Agama, Pertanian/Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Transmigrasi dan Pemukiman, Kelautan, Peternakan dan sektor lainnya. Tantangan lainnya adalah perkembangan globalisasi yang menghilangkan batas antar wilayah dan antar Negara.

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan dunia yang sangat pesat, tidak dapat dihindari akan memasuki pasar pelayanan kesehatan di Indonesia dan menggeser sistem pelayanan kesehatan di negara kita yang belum sesuai dengan kondisi terkini. Dengan adanya globalisasi, seluruh tenaga kesehatan (Medis, Paramedis dan Non Medis) dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal dan prima dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan tingginya tuntutan tersebut, sarana dan prasarana kesehatan dari level terendah hingga tertinggi harus disediakan dan dilengkapi segala fasilitasnya agar dapat mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat.

Di lain pihak, makin banyak pasien di Puskesmas dan Rumah sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan, artinya dari sisi kuratif dan rehabilitatif terjadi peningkatan demand sementara dari sisi preventif dan promotif masih jauh ketinggalan. Hal ini perlu perhatian serius, mengingat aspek preventif dan promotif merupakan strategi utama

yang sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tuntutan terbesar terhadap keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Aspek promotif dan preventif ini harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan secara optimal dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait, stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat.

Adapun peluang pengembangan pelayanan bagi sektor kesehatan ke depan sangat terbuka lebar, terlebih kesehatan merupakan program prioritas, dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka system pemeliharaan kesehatan masyarakat akan tertata dengan baik. Sistem Kesehatan di Indonesia didukung oleh pembiayaan pemerintah yang cukup besar. Pembiayaan pemerintah bersumber baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Anggaran pemerintah Pusat disalurkan melalui berbagai saluran misalnya DAU, DAK, DAK non fisik (BOK, Jampersal, Akreditasi Puskesmas/Rumah sakit). Sementara anggaran pemerintah daerah dapat dalam berbagai bentuk untuk mendukung program Pusat maupun untuk pembiayaan program inovasi daerah sendiri.

Dengan begitu banyaknya sumber-sumber pembiayaan system kesehatan di Indonesia, diharapkan dapat memberi daya ungkit terhadap layanan kesehatan. Aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif mendapatkan porsi yang seimbang dan akan terlaksana dengan optimal, tenaga kesehatan akan termanfaatkan dengan baik pada aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif, dan seluruh masyarakat akan terlayani dengan baik. Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini juga memberikan peluang terhadap peningkatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

Dari analisis pembangunan dan masalah pembangunan kesehatan, dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, **maka isu strategis** yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah :

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. Eliminasi TB
3. Percepatan Penurunan Stunting
4. Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi
5. Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
6. Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
7. Peningkatan pelayanan Kesehatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebabkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Disamping menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau, memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya kemitraan dengan lintas sektor terkait yang berpotensi dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2021.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau berupa rancangan awal RKPD. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan terdapat perbedaan antara lain adanya kegiatan baru dan penambahan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. Dalam penyusunan RKPD 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Riau sudah diarahkan untuk melakukan penyangkapan dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA 2019-2024) Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan mengarah menggunakan ketentuan yang ada dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

Dengan adanya kejadian Pandemi COVID 19 pada tahun 2020 maka rencana kerja mengalami beberapa penambahan dan pergeseran anggaran dan kegiatan, hal ini akan mengakibatkan capaian target pada tahun 2020 tidak tercapai seperti yang sudah tercantum dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka akan mengakibatkan perubahan pada rencana kerja tahun 2020.

Hal ini akan menyebabkan hasil evaluasi renja 2020 akan menurun dikarenakan kejadian Pandemi COVID 19. Adapun hasil review program dan kegiatan tahun 2021 akan tercantum pada **Tabel T-C. 31**.

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2021
Provinsi Riau

Nama perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	NON URUSAN					NON URUSAN					
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	8.172.929.831	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	8.766.511.469	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Riau	Jumlah surat yang dikirim	1500 surat	37.484.622	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Riau	Jumlah surat yang dikirim	1500 surat	37.484.622	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	156 rek	1.771.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	156 rek	1.771.200.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	368.203.755	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	368.203.755	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	789.195.040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	839.185.040	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi Riau	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 unit	162.450.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi Riau	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 unit	162.460.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Riau	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	25 jenis	174.577.737	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Riau	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	25 jenis	440.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 jenis	206.543.262	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 jenis	356.543.252	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	209.493.468	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	309.000.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi Riau	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5500 porsi	292.128.420	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi Riau	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5500 porsi	392.128.420	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12 kali	588.047.340	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12 kali	588.047.340	
	Penyediaan jasa administrasi kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	100 ob	2.701.152.217	Penyediaan jasa administrasi kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	100 ob	2.696.669.040	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 oh	872.453.970	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 oh	805.590.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	1.780.727.625	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Provinsi Riau	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	1.780.727.625	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 ruang	929.012.866	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 ruang	929.012.866	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	13 unit	418.143.259	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	13 unit	418.143.259	
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	107 unit	433.571.500	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	107 unit	433.571.500	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase tingkat kehadiran ASN	100 persen	607.220.123	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Provinsi Riau	Persentase tingkat kehadiran ASN	100 persen	1.780.727.626	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Riau	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 stel	256.999.125	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Riau	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 stel	929.012.866	
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	134 stel	87.070.000	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	134 stel	418.143.260	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Provinsi Riau	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	350 stel	263.150.998	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Provinsi Riau	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	350 stel	433.571.500	

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Provinsi Riau	Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	85	persen	7.846.336.455	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Provinsi Riau	Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	85	persen	9.600.504.114
		Kunjungan Antenatal (K4) (%)	94	persen				Kunjungan Antenatal (K4) (%)	94	persen	
		Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	94	persen				Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	94	persen	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	24	persen				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	24	persen	
Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar		persen	258.900.000	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar		persen	258.900.000
Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	70	persen	246.789.000	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	70	persen	50.000.000
Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	100	persen	250.000.000	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	100	persen	50.000.000
Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Provinsi Riau	Persentase Capaian UKBM Aktif	56	persen	634.640.000	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Provinsi Riau	Persentase Capaian UKBM Aktif	56	persen	70.000.000
Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	12	kab/kota	1.806.249.000	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	12	kab/kota	200.000.000
Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Riau, Bengkalis, Siak	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	19	opd	676.878.455	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Riau, Bengkalis, Siak	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 indikator GERMAS.	19	opd	130.000.000
Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	12 Kab/Kota di Provinsi Riau	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12	kab/kota	250.000.000	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	12 Kab/Kota di Provinsi Riau	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12	kab/kota	50.000.000
Pembinaan dalam peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia	Provinsi Riau	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan pelayanan Geriatri Terpadu	22	persen	250.000.000	Pembinaan dalam peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia	Provinsi Riau	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan pelayanan Geriatri Terpadu	22	persen	50.000.000
Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC)	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang memberikan ayanan ibu hamil memenuhi standar (ANC Terintegrasi)	180	plm	250.000.000	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC)	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar (ANC Terintegrasi)	180	plm	170.000.000
Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60	kasus	350.000.000	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60	kasus	155.000.000
Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu hamil dan remaja putri	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah Gizi Ibu hamil dan remaja putri	66	persen	250.900.000	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu hamil dan remaja putri	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah Gizi Ibu hamil dan remaja putri	66	persen	50.000.000
Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	93	persen	650.000.000	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	93	persen	7.817.520.000
Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Provinsi Riau	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	36	org	96.380.000	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Provinsi Riau	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	36	org	25.000.000
Pembinaan Surveilans Gizi	Provinsi Riau	Persentase Status Gizi balita berdasarkan Indeks	13	persen	216.600.000	Pembinaan Surveilans Gizi	Provinsi Riau	Persentase Status Gizi balita berdasarkan Indeks	13	persen	50.000.000
Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	60	persen	450.000.000	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	60	persen	110.000.000
Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Provinsi Riau	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1345	desa/kel	450.000.000	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Provinsi Riau	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1345	desa/kel	65.000.000
Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	62	persen	250.000.000	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	62	persen	59.084.114
Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	6	kab/kota	309.000.000	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	6	kab/kota	190.000.000

	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	24	persen	200.000.000	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	24	persen	50.000.000
	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN	Provinsi Riau	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	100	persen	184.136.803.133	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN	Provinsi Riau	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	100	persen	184.455.307.525
	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	88	persen	168.096.000	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	88	persen	486.600.392
	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Provinsi Riau	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	100	persen	10.880.000.000	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Provinsi Riau	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	100	persen	10.880.000.000
	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Provinsi Riau	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah kedalam Program JKN	90	persen	173.088.707.133	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Provinsi Riau	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah kedalam Program JKN	90	persen	173.088.707.133
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Provinsi Riau	Persentase Capaian Indikator Kinerja FKTL sesuai standar	55	persen	16.225.411.565	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Provinsi Riau	Persentase Capaian Indikator Kinerja FKTL sesuai standar	55	persen	16.478.691.565
			Persentase FKTP sesuai standar	100	persen				Persentase FKTP sesuai standar	100	persen	
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	100	persen				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	100	persen	
			Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	100	persen				Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	100	persen	
			Persentase Kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium	85	persen				Persentase Kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium	85	persen	
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	50	persen	167.203.840	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	50	persen	167.203.840
	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	45	persen	188.224.000	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	45	persen	188.224.000
	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	50	persen	863.940.000	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	50	persen	863.940.000
	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100	persen	290.000.000	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100	persen	290.000.000
	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	88	persen	180.608.000	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	88	persen	180.608.000
	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	45	persen	73.997.056	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	45	persen	73.997.056
	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100	persen	108.800.000	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100	persen	108.800.000
	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	25	persen	120.751.353	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	25	persen	120.751.353
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	50	persen	190.400.000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	50	persen	190.400.000

Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	50 persen	136.000.000	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	50 persen	136.000.000
Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	5 pkm	50.000.000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	5 pkm	50.000.000
Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	100 persen	128.000.000	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	100 persen	128.000.000
Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100 persen	90.387.481	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100 persen	90.387.481
Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	35 persen	130.567.232	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	35 persen	130.567.232
Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 persen	340.015.283	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 persen	340.015.283
Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan management krisis kesehatan	100 persen	190.400.000	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan management krisis kesehatan	100 persen	190.400.000
Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase SDM Puskesmas Kab/Kota rawan bencana yang dilatih penanggulangan krisis kesehatan	65 persen	215.304.320	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase SDM Puskesmas Kab/Kota rawan bencana yang dilatih penanggulangan krisis kesehatan	65 persen	215.304.320
Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pemenuhan peralatan penanggulangan krisis kesehatan provinsi	100 persen	488.512.000	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pemenuhan peralatan penanggulangan krisis kesehatan provinsi	100 persen	488.512.000
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 dok	487.350.000	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 dok	487.350.000
Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Provinsi Riau	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 dok	110.600.000	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Provinsi Riau	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 dok	110.600.000
Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau.	100 persen	350.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau.	100 persen	350.000.000
Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	13 dok	86.640.000	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	13 dok	86.640.000
Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkat kapasitasnya	100 persen	60.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkat kapasitasnya	100 persen	60.000.000
Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 persen	116.000.000	Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 persen	116.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 persen	80.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 persen	80.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Provinsi Riau	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 persen	893.480.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Provinsi Riau	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 persen	1.146.760.000
Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 persen	86.640.000	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 persen	86.640.000
Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Provinsi Riau	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar	50 persen	297.825.000	Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Provinsi Riau	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar	50 persen	297.825.000
Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	771.096.000	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	771.096.000

	Pemenuhan ketersediaan bahan regensia pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan regensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100 persen	3.060.390.000	Pemenuhan ketersediaan bahan regensia pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan regensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100 persen	3.060.390.000
	Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	2.084.775.000	Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	2.084.775.000
	Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat alat laboratorium pelayanan Lingkungan sesuai standar	100 persen	3.787.505.000	Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat alat laboratorium pelayanan Lingkungan sesuai standar	100 persen	3.787.505.000
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang diobati	28 persen	2.427.988.344	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang diobati	28 persen	2.427.988.344
			Success Rate TB Paru	90 persen				Success Rate TB Paru	90 persen	
			Annual Parasit Inciden (API)	<1/1000 pddk				Annual Parasit Inciden (API)	<1/1000 pddk	
			Persentase capaian imunisasi dasar	93 persen				Persentase capaian imunisasi dasar	93 persen	
			Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	100 persen				Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	100 persen	
			Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70 persen				Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70 persen	
			Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70 persen				Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70 persen	
	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	81 persen	200.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	81 persen	200.500.000
	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Provinsi Riau	Persentase bumul yang diperiksa syphilis dan diobati	90 persen	88.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Provinsi Riau	Persentase bumul yang diperiksa syphilis dan diobati	90 persen	88.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Provinsi Riau	Succes Rate TB	90 persen	226.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Provinsi Riau	Succes Rate TB	90 persen	226.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Provinsi Riau	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	97 persen	117.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Provinsi Riau	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	97 persen	117.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Provinsi Riau	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	90 persen	160.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Provinsi Riau	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	90 persen	160.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	85 persen	107.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	85 persen	107.000.000
	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Provinsi Riau	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	60 persen	60.800.000	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Provinsi Riau	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	60 persen	60.800.000
	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Provinsi Riau	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	94 persen	100.000.000	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Provinsi Riau	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	94 persen	100.000.000
	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Provinsi Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	100 persen	340.000.000	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Provinsi Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	100 persen	340.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	58 persen	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	58 persen	50.000.000
	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	100 persen	152.000.000	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	100 persen	152.000.000
	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Provinsi Riau	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	72 persen	108.000.000	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Provinsi Riau	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	72 persen	108.000.000

	Pengendalian Kasus Zoonosis	Provinsi Riau	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	100 persen	49.980.000	Pengendalian Kasus Zoonosis	Provinsi Riau	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	100 persen	49.980.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit Menular DBD	Provinsi Riau	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	IR< 44 per 100.000	71.961.667	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit Menular DBD	Provinsi Riau	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	IR< 44 per 100.000	71.961.667
	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	80 persen	46.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	80 persen	46.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Provinsi Riau	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100 persen	46.746.677	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Provinsi Riau	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100 persen	46.746.677
	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil	90 persen	52.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil	90 persen	52.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacingan	Provinsi Riau	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacing	79 persen	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacingan	Provinsi Riau	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacing	79 persen	50.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Provinsi Riau	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 persen	52.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Provinsi Riau	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 persen	52.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Provinsi Riau	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	70 persen	240.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Provinsi Riau	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	70 persen	240.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	32 persen	110.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	32 persen	110.000.000
	PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES		Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	56 persen	4.088.345.436	PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES		Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	56 persen	4.524.122.938
			Persentase sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alkes sesuai standar	60 persen				Persentase sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alkes sesuai standar	60 persen	
			Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan logistik	100 persen				Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan logistik	100 persen	
	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	RS, PKM, IPWL se Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	75 persen	219.150.000	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	RS, PKM, IPWL se Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	75 persen	219.150.000
	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	PKM, RS di Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	75 persen	119.130.000	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	PKM, RS di Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	75 persen	56.857.500
	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Provinsi	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	85 persen	54.150.000	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Provinsi	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	85 persen	54.150.000
	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Provinsi Riau (sarana produksi dan distribusi kefarmasian , alkes dan PKRT)	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang dibina sesuai standar	60 persen	162.450.000	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Provinsi Riau (sarana produksi dan distribusi kefarmasian , alkes dan PKRT)	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang dibina sesuai standar	60 persen	100.000.000
	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	IFLK kab/kota Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	89 persen	126.709.998	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	IFLK kab/kota Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	89 persen	31.677.500
	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	IFLK kab/kota Provinsi Riau	Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	86 persen	667.120.000	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	IFLK kab/kota Provinsi Riau	Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	86 persen	2.667.120.000
	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	86 persen	2.099.142.093	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	86 persen	1.282.265.438

	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 dok	216.600.000	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 dok	61.460.000
	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Provinsi Riau	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 persen	326.423.345	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Provinsi Riau	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 persen	27.075.000
	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	IFLK kab/kota Provinsi Riau	Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	85 persen	97.470.000	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	IFLK kab/kota Provinsi Riau	Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	85 persen	24.367.500
	Program Pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia		Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar	100 persen	10.268.769.062	Program Pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia		Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar	100 persen	10.735.743.588
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai Kompetensi Sesuai Standar	60 persen				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai Kompetensi Sesuai Standar	60 persen	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdm, data renbut, ns, wkds)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	12 dok	59.565.000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdm, data renbut, ns, wkds)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	12 dok	59.565.000
	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Pekanbaru (Provinsi Riau)	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 persen	54.150.000	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Pekanbaru (Provinsi Riau)	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 persen	52.284.839
	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Faskes Kab/Kota	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 persen	86.640.000	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Faskes Kab/Kota	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 persen	86.640.000
	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, ppsd/ppdgs)	Kab/Kota di Provinsi Riau	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	150 org	134.309.652	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, ppsd/ppdgs)	Kab/Kota di Provinsi Riau	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	150 org	534.664.652
	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191 org	6.127.945.313	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191 org	5.907.180.000
	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkanpelatihan Sesuai Standar	20 org	162.450.000	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkanpelatihan Sesuai Standar	20 org	162.450.000
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	30 persen	920.550.000	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	30 persen	920.550.000
	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	Provinsi Riau	Persentase Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	60 persen	72.000.000	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	Provinsi Riau	Persentase Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	60 persen	72.000.000
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	120 org	2.651.159.097	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	120 org	2.885.629.097
	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Provinsi Riau	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2 buku	-	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Provinsi Riau	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2 buku	54.780.000
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan		Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar		240.939.753	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan		Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar		60.234.938
	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Pekanbaru (Provinsi Riau)	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 persen	240.939.753	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Pekanbaru (Provinsi Riau)	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 persen	60.234.938
	Jumlah				235.795.471.327					238.829.832.106

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 diambil dari proses *bottom up planning dan top down planning* dengan mengacu kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2021 dan rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2019-2024. Pada proses *bottom up planning*, lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh lintas Sektor Perangkat Daerah dan mitra kerja seluruh perangkat daerah yang berjumlah 12 kabupaten/kota dan rumah sakit swasta dan pemerintah kabupaten/kota, dan 40 perangkat daerah di Provinsi Riau. Sedangkan pada proses *top downnya* bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan makin berbasis teknologi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan dalam menerima pelayanan. Untuk itu kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumberdaya yang makin terstandarisasi, sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan 2021 tercantum dalam tabel **T-C. 32 sebagai berikut :**

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Palang Merah Indonesia Provinsi Riau	Jl. Mekar Sari No 01 Pekanbaru -Riau		1	Usulan 2021
2	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Provinsi Riau		1	Usulan 2021
3	Hibah Barang	Kab/Kota			DPRD Provinsi Riau
4	Koalisi Organisasi Profesi untuk TB (KOPI TB)	Kab/Kota			Koordinasi Lintas Profesi untuk pemberantasan TB di Provinsi Riau

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan

Pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke-3 (2019–2024) diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Dinas Kesehatan Provinsi Riau memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan nasional. Berbagai program dan kegiatan strategis dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

B. Telaahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Perumusan visi pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau 2005- 2025, isu strategis pembangunan Provinsi Riau dan juga memperhatikan visi RPJMN 2015-2019. Misi dalam rangka mewujudkan visi tersebut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah **“Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya”**.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Visi: **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing,Sejahtera,**

Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)". Misi Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya**
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi

Berdasarkan telaahan visi dan misi tersebut, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam misi kesatu yaitu "Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya" adalah "**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**".

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Target Visi dan Misi Gubernur Riau Tahun 2021

No	Tujuan /Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.67

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan kesatu terutama yang berkaitan dengan bidang kesehatan yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat" dengan indikator sasaran :

- 1) Persentase penurunan kematian ibu
- 2) Persentase penurunan kematian bayi
- 3) Persentase penurunan kematian balita
- 4) Persentase *Stunting*
- 5) Persentase ODHA yang diobati
- 6) Persentase pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit tidak menular
- 7) Persentase pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC)
- 8) Succes Rate
- 9) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat dan atau berpotensi bencana
- 10) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi

3.3 Program Dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pencapaian standar pelayanan minimal
- Pelayanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin
- Tambahkan terkait preventif dan promotif

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 adalah :

- 1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Pembiayaan Kesehatan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 5) Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes
- 6) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2021 ada perubahan program dan kegiatan dan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019. Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 program/kegiatan menjadi 10 program dan 129 kegiatan. Penggabungan Program ini dikarenakan untuk mengefisienkan dalam pelaksanaan dalam mencapai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mendukung penurunan Kejadian Mortalitas dan Morbiditas di Provinsi Riau. Rincian program dan kegiatan tahun 2021 akan dicantumkan pada Tabel T-C.33

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 terdapat 10 program yang terdiri dari 3 program non urusan dan 7 program urusan. Secara analisis bila pemerintah daerah terlalu fokus memberikan layanan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, maka pencapaian program preventif dan promotif akan terganggu. Sehingga kedepannya perlu keseimbangan dalam penganggaran untuk urusan kesehatan. **Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.**

Tabel T-C. 33

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Riau

Nama perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	NON URUSAN								
					184.431.659.040				268.661.901.686
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 persen	8.766.511.469			100 persen	8.834.995.810
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Provinsi Riau	1.500 surat	37.484.622	APBD		1.700 surat	39.484.622
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Provinsi Riau	48 rekening	1.771.200.000	APBD		156 rekening	1.799.052.698
3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Riau	6 unit	368.203.755	APBD		6 unit	402.084.142
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi Riau	12 bulan	839.195.040	APBD		12 bulan	789.295.040
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	Provinsi Riau	200 unit	162.450.000	APBD		200 unit	362.450.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Provinsi Riau	25 jenis	440.000.000	APBD		25 jenis	282.577.737
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Provinsi Riau	25 jenis	356.543.252	APBD		25 jenis	224.615.797
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Provinsi Riau	10 jenis	309.000.000	APBD		10 jenis	293.438.106

10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Provinsi Riau	5.500 porsi	392.128.420	APBD		5.500 porsi	318.890.000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	12 kali	588.047.340	APBD		12 kali	639.501.482
12	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Provinsi Riau	100 orang bulan	2.696.669.040	APBD		100 orang bulan	2.801.152.216
13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Provinsi Riau	14 orang bulan	805.590.000	APBD		14 orang bulan	882.453.970
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 persen	1.087.600.000			100 persen	1.903.191.225
14	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Riau	30 ruang	200.000.000	APBD		30 ruang	989.012.866
15	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	Provinsi Riau	13 unit	275.000.000	APBD		13 unit	444.143.259
16	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Riau	107 unit	612.600.000	APBD		110 unit	470.035.100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase tingkat kehadiran ASN	Provinsi Riau	100 persen	-		Provinsi Riau	100 persen	648.979.661
17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Provinsi Riau	350 stel	-	APBD	Provinsi Riau	350 stel	270.918.971
18	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	Provinsi Riau	134 stel	-	APBD	Provinsi Riau	134 stel	104.219.844
19	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Provinsi Riau	350 stel	-	APBD	Provinsi Riau	350 stel	273.840.846
4	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	Provinsi Riau	85 persen	9.391.256.570		Provinsi Riau	90 persen	8.385.942.066
		Kunjungan Antenatal (K4) (%)		94 persen				96 persen	

		Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)		94 persen				96 persen	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita		20,50 persen				18,20 persen	
20	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	Provinsi Riau	41 persen	49.652.456	APBD	Provinsi Riau	46 persen	281.553.750
21	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Provinsi Riau	70 persen	50.000.000	APBD	Provinsi Riau	75 persen	269.383.038
22	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Provinsi Riau	100 persen	50.000.000	APBD	Provinsi Riau	100 persen	271.875.000
23	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Persentase Capaian UKBM Aktif	Provinsi Riau	56 persen	70.000.000	APBD	Provinsi Riau	59 persen	650.171.000
24	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	Provinsi Riau	12 kab/kota	200.000.000	APBD	Provinsi Riau	12 kab/kota	1.857.346.959
25	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	Provinsi Riau, Bengkalis, Siak	19 Perangkat Daerah	130.000.000	APBD	Provinsi Riau	22 Perangkat Daerah	736.105.319
26	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12 Kab/Kota di Provinsi Riau	12 kab/kota	50.000.000	APBD	Provinsi Riau	12 kab/kota	271.875.000
27	Pembinaan dalam peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan pelayanan Geriatri Terpadu	Provinsi Riau	22 persen	50.000.000	APBD	Provinsi Riau	24 persen	271.875.000

28	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC)	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar (ANC Terintegrasi)	Provinsi Riau	180 puskesmas	170.000.000	APBD	Provinsi Riau	200 puskesmas	271.875.000
29	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	Provinsi Riau	60 kasus	155.000.000	APBD	Provinsi Riau	60 kasus	380.625.000
30	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu hamil dan remaja putri	Persentase penanggulangan masalah Gizi Ibu hamil dan remaja putri	Provinsi Riau	66 persen	50.000.000	APBD	Provinsi Riau	68 persen	271.853.750
31	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	Provinsi Riau	93 persen	7.817.520.000	APBD	Provinsi Riau	93 persen	706.875.000
32	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	Provinsi Riau	36 org	25.000.000	APBD	Provinsi Riau	36 org	104.813.250
33	Pembinaan Surveilans Gizi	Persentase Status Gizi balita berdasarkan Indeks	Provinsi Riau	13 persen	50.000.000	APBD	Provinsi Riau	13 persen	235.552.500
34	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	60 persen	110.000.000	APBD	Provinsi Riau	65 persen	489.375.000
35	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	Provinsi Riau	1.345 desa/kel	65.000.000	APBD	Provinsi Riau	1.520 desa/kel	489.375.000
36	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	Provinsi Riau	62 persen	59.084.114	APBD	Provinsi Riau	64 persen	271.875.000
37	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Provinsi Riau	6 kab/kota	190.000.000	APBD	Provinsi Riau	8 kab/kota	336.037.500

38	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Provinsi Riau	24 persen	50.000.000	APBD	Provinsi Riau	26 persen	217.500.000
5	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	Provinsi Riau	100 Persen	147.659.895.027		Provinsi Riau	100 Persen	213.209.541.573
39	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	Provinsi Riau	88 persen	486.600.392	APBD	Provinsi Riau	90 persen	182.804.400
40	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	Provinsi Riau	100 persen	8.803.601.635	APBD	Provinsi Riau	100 persen	11.832.000.000
41	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah kedalam Program JKN	Provinsi Riau	90 persen	138.369.693.000	APBD	Provinsi Riau	93 persen	201.194.737.173
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Capaian Indikator Kinerja FKTL sesuai standar	Provinsi Riau	45 Persen	5.199.286.008		Provinsi Riau	55 Persen	17.329.791.533
		Persentase FKTP sesuai standar		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana		100 Persen				100 Persen	

		Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium		65 Persen				70 Persen	
42	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Provinsi Riau	50 persen	115.897.300	APBD	Provinsi Riau	55 persen	181.834.176
43	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	Provinsi Riau	45 persen	-	APBD	Provinsi Riau	48 persen	204.693.600
44	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	Provinsi Riau	50 persen	825.000.000	APBD	Provinsi Riau	52 persen	939.534.750
45	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	Provinsi Riau	100 persen	218.800.000	APBD	Provinsi Riau	100 persen	304.137.500
46	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Persentase RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	Provinsi Riau	88 persen	72.156.000	APBD	Provinsi Riau	90 persen	196.411.200
47	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	Provinsi Riau	45 persen	-	APBD	Provinsi Riau	55 persen	80.471.798
48	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	74.736.000	APBD	Provinsi Riau	100 persen	118.320.000

49	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	Provinsi Riau	25 persen	-	APBD	Provinsi Riau	30 persen	131.317.097
50	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	Provinsi Riau	50 persen	43.484.000	APBD	Provinsi Riau	55 persen	207.060.000
51	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	Provinsi Riau	50 persen	-	APBD	Provinsi Riau	55 persen	147.900.000
52	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	Provinsi Riau	5 puskesmas	-	APBD	Provinsi Riau	8 puskesmas	59.160.000
53	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	Provinsi Riau	82 persen	-	APBD	Provinsi Riau	84 persen	139.200.000
54	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	98.296.386
55	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	Provinsi Riau	35 persen	-	APBD	Provinsi Riau	40 persen	141.991.864
56	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	219.635.281	APBD	Provinsi Riau	100 persen	370.896.400

57	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan management krisis kesehatan	Provinsi Riau	100 persen	281.879.994	APBD	Provinsi Riau	100 persen	207.060.000
58	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Persentase SDM Puskesmas Kab/Kota rawan bencana yang dilatih penanggulangan krisis kesehatan	Provinsi Riau	65 persen	117.112.000	APBD	Provinsi Riau	75 persen	225.305.320
59	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase pemenuhan peralatan penanggulangan krisis kesehatan provinsi	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	531.256.800
60	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	Provinsi Riau	1 dokumen	260.810.000	APBD	Provinsi Riau	1 dokumen	529.993.125
61	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	Provinsi Riau	2 dokumen	-	APBD	Provinsi Riau	2 dokumen	120.277.500
62	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau.	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	380.650.000
63	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	Provinsi Riau	13 dokumen	-	APBD	Provinsi Riau	13 dokumen	86.640.000
64	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkat kapasitasnya	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	65.250.000

65	Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	Provinsi Riau	100	persen	344.307.500	APBD	Provinsi Riau	100	persen	126.150.000
66	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	80	persen	-	APBD	Provinsi Riau	80	persen	80.000.000
67	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	Provinsi Riau	100	persen	632.670.000	APBD	Provinsi Riau	100	persen	971.659.500
68	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	Provinsi Riau	85	persen	-	APBD	Provinsi Riau	85	persen	86.640.000
69	Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standard	Provinsi Riau	50	persen	297.825.000	APBD	Provinsi Riau	55	persen	323.884.680
70	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	Provinsi Riau	100	persen	725.000.000	APBD	Provinsi Riau	100	persen	838.566.900
71	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	Provinsi Riau	100	persen	-	APBD	Provinsi Riau	100	persen	3.328.174.125
72	Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan laboratorium klinis	Persentase ketersediaan alat alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	Provinsi Riau	100	persen	969.972.933	APBD	Provinsi Riau	100	persen	2.267.192.812
73	Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase ketersediaan alat alat laboratorium pelayanan Lingkungan sesuai standar	Provinsi Riau	100	persen	-	APBD	Provinsi Riau	100	persen	3.839.866.000
7	PROGRAM PENCEGAHAN	Persentase ODHA yang diobati	Provinsi Riau	28	Persen	1.190.000.000		Provinsi Riau	33	Persen	2.607.215.142
		Success Rate TB Paru		90	Persen				95	Persen	

		Annual Parasit Inciden (API)		<1/100.000 penduduk				penduduk		
		Persentase capaian imunisasi dasar		90	Persen			Persen		
		Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%		100	Persen			Persen		
		Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		60	Persen			Persen		
		Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		60	Persen			Persen		
74	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	Provinsi Riau	81	persen	100.000.000	APBD	Provinsi Riau	81 persen	215.000.000
75	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan diobati	Provinsi Riau	90	persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	93.700.000
76	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Succes Rate TB	Provinsi Riau	90	persen	100.000.000	APBD	Provinsi Riau	90 persen	245.775.000
77	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	Provinsi Riau	97	persen	-	APBD	Provinsi Riau	98 persen	127.237.500
78	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	Provinsi Riau	90	persen	205.761.600	APBD	Provinsi Riau	92 persen	174.000.000
79	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	85	persen	-	APBD	Provinsi Riau	85 persen	116.362.500

80	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	Provinsi Riau	60 persen	85.893.600	APBD	Provinsi Riau	70 persen	86.120.000
81	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	Provinsi Riau	94 persen	100.000.000	APBD	Provinsi Riau	96 persen	241.118.000
82	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	Provinsi Riau	100 persen	211.232.000	APBD	Provinsi Riau	100 persen	209.882.000
83	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	Provinsi Riau	58 persen	-	APBD	Provinsi Riau	66 persen	54.375.000
84	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	Provinsi Riau	100 persen	97.112.800	APBD	Provinsi Riau	100 persen	159.904.881
85	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	Provinsi Riau	72 persen	100.000.000	APBD	Provinsi Riau	74 persen	117.450.000
86	Pengendalian Kasus Zoonosis	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	54.353.250
87	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	Provinsi Riau	IR< 44 per 100.000 penduduk	-	APBD	Provinsi Riau	IR< 43 per 100.000 penduduk	75.000.000

88	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	Provinsi Riau	80 persen	-	APBD	Provinsi Riau	90 persen	49.000.000
89	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	50.837.011
90	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil	Provinsi Riau	90 persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	56.550.000
91	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacingan	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacing	Provinsi Riau	79 persen	-	APBD	Provinsi Riau	81 persen	54.375.000
92	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD	Provinsi Riau	100 persen	56.550.000
93	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	Provinsi Riau	70 persen	190.000.000	APBD	Provinsi Riau	80 persen	250.000.000
94	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	Provinsi Riau	32 persen	-	APBD	Provinsi Riau	36 persen	119.625.000
8	PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES	Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar		56 persen	4.250.822.938			61 persen	4.539.507.754
		Persentase sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alkes sesuai standar		58 persen				60 persen	

		Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan logistik		99 persen				100 persen	
95	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	RS, PKM, IPWL se Provinsi Riau	75 persen	-	APBD	RS, PKM, IPWL se Provinsi Riau	80 persen	220.000.000
96	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	PKM, RS di Provinsi Riau	75 persen	56.857.500	APBD	PKM, RS di Provinsi Riau	80 persen	129.550.000
97	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Provinsi Riau	85 persen	-	APBD	Provinsi Riau	87 persen	58.890.000
98	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang dibina sesuai standar	Provinsi Riau (sarana produksi dan distribusi kefarmasian , alkes dan PKRT)	60 persen	100.000.000	APBD	Provinsi Riau (sarana produksi dan distribusi kefarmasian , alkes dan PKRT)	63 persen	176.660.000
99	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	IFLK kab/kota Provinsi Riau	89 persen	31.677.500	APBD	IFLK kab/kota Provinsi Riau	90 persen	137.800.000

100	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	IFLK kab/kota Provinsi Riau	86 persen	2.667.120.000	APBD	IFLK kab/kota Provinsi Riau	88 persen	725.500.000
101	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	86 persen	1.282.265.438	APBD	Provinsi Riau	88 persen	1.835.000.000
102	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 dokumen	61.460.000	APBD	Provinsi Riau	1 dokumen	235.550.000
103	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	27.075.000	APBD	Provinsi Riau	100 persen	516.168.877
104	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	IFLK kab/kota Provinsi Riau	85 persen	24.367.500	APBD	IFLK kab/kota Provinsi Riau	90 persen	504.388.877
9	Program Pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia	Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar		100 Persen	6.826.052.090			100 Persen	10.945.227.342
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai Kompetensi Sesuai Standar		60 Persen				75 Persen	
105	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	12 dokumen	-	APBD		12 dokumen	155.000.125

106	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan	Persentase ASN yang mengikuti uji	Pekanbaru (Provinsi Riau)	100 persen	52.284.839	APBD		100 persen	150.000.000
107	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	Faskes Kab/Kota	100 persen	-	APBD		100 persen	180.000.000
108	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	Kab/Kota di Provinsi Riau	150 orang	115.047.477	APBD		155 orang	146.061.747
109	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	191 orang	5.907.180.000	APBD		191 orang	6.128.945.000
110	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkan pelatihan Sesuai Standar	Provinsi Riau	20 orang	-	APBD		25 orang	176.664.375
111	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	Provinsi Riau	30 persen	204.161.376	APBD		30 persen	1.045.750.753
112	Evaluasi Pasca Pelatihan yang	Persentase Peserta Yang Menerapkan Hasil	Provinsi Riau	60 persen	-	APBD		100 persen	74.000.000
113	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	Provinsi Riau	120 orang	492.598.398	APBD		120 orang	2.828.547.342
114	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun	Provinsi Riau	2 buku	54.780.000	APBD		2 buku	60.258.000
10	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	Pekanbaru (Provinsi Riau)	67 persen	60.234.938		Pekanbaru (Provinsi Riau)	70 persen	257.509.580
116	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	Pekanbaru (Provinsi Riau)	100 persen	60.234.938	APBD		100 persen	257.509.580
Jumlah					184.431.659.040				268.661.901.686

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 116 (seratus enam belas) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021

Nomor		Uraian
Program	Kegiatan	
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1	Penyediaan Jasa Surat menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	9	Penyediaan Makan dan Minuman
	10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
	12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		
17	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		
18	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		
4		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	
19	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes		
20	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes		
21	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes		
22	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat		
23	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan		
24	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		
25	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar		
26	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia		
27	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC)		
28	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi		
29	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting		
30	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri		
31	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi		
32	Pembinaan Surveilans Gizi		
33	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas		
34	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM		
35	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)		
36	Pengembangan wilayah pemukiman sehat		
37	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		
5		Program Pembiayaan Kesehatan	

	38	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan
	39	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
	40	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN
6		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	41	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau
	42	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau
	43	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119
	44	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau
	45	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau
	46	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau
	47	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau
	48	Pembinaan Laboratorium di FKTP
	49	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi
	50	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau
	51	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata
	52	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau
	53	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau
	54	Pembinaan Puskesmas PONEC tingkat Provinsi Riau
	55	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau
	56	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau
	57	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau
	58	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau
	59	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)

	60	Pembinaan Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD
	61	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau
	62	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau
	63	Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan
	64	Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
	65	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan
	66	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
	67	Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau
	68	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Klinis dan Lingkungan
	69	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Klinis
	70	Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat Pelayanan Laboratorium Klinis
	71	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Lingkungan
	72	Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat Pelayanan Laboratorium Lingkungan
7		Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
	73	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS
	74	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS
	75	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB
	76	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria
	77	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar
	78	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan
	79	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
	80	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
	81	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau

	82	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan
	83	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB
	84	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang
	85	Pengendalian Kasus Zoonosis
	86	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD
	87	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA
	88	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare
	89	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus
	90	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacingan
	91	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia
	92	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
	93	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA
8		Program Pelayanan Kefarmasian Dan Alkes
	94	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau
	95	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau
	96	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar
	97	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau
	98	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau
	99	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program
	100	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau
	101	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau

	102	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar
	103	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau
9		Program Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
	104	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)
	105	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan
	106	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
	107	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, ppds/ppdgs)
	108	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau
	109	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES
	110	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES
	111	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes
	112	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan
	113	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan
10		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
	114	Pengelolaan data sarana dan prasarana kesehatan di provinsi riau
	115	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau
	116	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang

Rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI RIAU**

Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02.01.0.	NON URUSAN				9.854.111.469,00				10.738.187.035,00
1.1.02.01.0.0.	NON URUSAN				9.854.111.469,00				10.738.187.035,00
1.1.02.01.0.0.00.	NON URUSAN				9.854.111.469,00				10.738.187.035,00
1.1.02.01.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	8.766.511.469,00			100 Persen	8.834.995.810,00
1.1.02.01.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Kota Pekanbaru.	420 Surat	37.484.622	APBD		500 Surat	39.484.622
1.1.02.01.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kota Pekanbaru	156 Rekening	1.771.200.000	APBD		156 Rekening	1.799.052.698
1.1.02.01.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	6 unit	368.203.755	APBD		6 unit	402.084.142
1.1.02.01.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	12 Bulan	839.195.040	APBD		12 Bulan	789.295.040
1.1.02.01.0.0.00.01.005.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	Kota Pekanbaru	39 Unit	162.450.000	APBD		39 Unit	362.450.000
1.1.02.01.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	24 Jenis	440.000.000	APBD		24 Jenis	282.577.737
1.1.02.01.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kota Pekanbaru	25 Jenis	356.543.252	APBD		25 Jenis	224.615.797
1.1.02.01.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	10 Jenis	309.000.000	APBD		10 Jenis	293.438.106
1.1.02.01.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kota Pekanbaru	5500 Porsi	392.128.420	APBD		5500 Porsi	318.890.000
1.1.02.01.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Pekanbaru	12 Kali	588.047.340	APBD		12 Kali	639.501.482
1.1.02.01.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	101 OB	2.696.669.040	APBD		101 OB	2.801.152.216
1.1.02.01.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Kota Pekanbaru	27 OB	805.590.000	APBD		27 OB	882.453.970
1.1.02.01.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	1.087.600.000,00			100 Persen	1.903.191.225,00
1.1.02.01.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	4 Ruang	200.000.000	APBD		4 Ruang	989.012.866
1.1.02.01.0.0.00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Pekanbaru	17 Unit	275.000.000	APBD		17 Unit	444.143.259
1.1.02.01.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	21 Unit	612.600.000	APBD		21 Unit	470.035.100
1.1.02.01.1.	URUSAN WAJIB				174.577.547.571,00				245.980.430.109,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.15.025.	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	100 Persen	50.000.000	APBD		100 Persen	271.875.000
1.1.02.01.1.1.02.15.027.	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Persentase Capaian UKBM Aktif	Kota Pekanbaru	56,17 Persen	70.000.000	APBD		59,50 Persen	650.171.000
1.1.02.01.1.1.02.15.029.	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan "; Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan ";	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai.	12 ; 12 Kabupaten/Kota;	200.000.000	APBD		12;12 Kabupaten/Kota;	1.857.346.959
1.1.02.01.1.1.02.15.030.	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	19 OPD	130.000.000	APBD		22 OPD	736.105.319

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.15.034.	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	12 Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD		12 Kabupaten/Kota	271.875.000
1.1.02.01.1.1.02.15.036.	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia	Persenstase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan Genatri Terpadu	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis,	24 Persen	50.000.000	APBD		24 Persen	271.875.000
1.1.02.01.1.1.02.15.039.	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC)	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar (ANC Terintegrasi)	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	60 Puskesmas	170.000.000	APBD		60 Puskesmas	271.875.000
1.1.02.01.1.1.02.15.042.	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	36 Kasus	155.000.000	APBD		36 Kasus	380.625.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.15.043.	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	93 Persen	7.817.520.000	APBD		93,2 Persen	706.875.000
1.1.02.01.1.1.02.15.044.	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	66 Persen	50.000.000	APBD		68 Persen	271.853.750
1.1.02.01.1.1.02.15.045.	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	"Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi "	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	20 Orang	25.000.000	APBD		36 Orang	104.813.250

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.15.046.	Pembinaan Surveilans Gizi	BB/U (gizi buruk dan kurang) "	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	12,75 Persen	50.000.000	APBD		12,7 Persen	235.552.500
1.1.02.01.1.1.02.15.048.	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai.	60 Persen	110.000.000	APBD		65 Persen	489.375.000
1.1.02.01.1.1.02.15.049.	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	1345 Desa/ Kelurahan	65.000.000	APBD		1520 Desa/ Kelurahan	489.375.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.15.050.	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	52 Persen	59.084.114	APBD		64 Persen	271.875.000
1.1.02.01.1.1.02.15.051.	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis,	5 Kabupaten/Kota	190.000.000	APBD		8 Kabupaten/Kota	336.037.500
1.1.02.01.1.1.02.15.052.	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai.	24 Persen	50.000.000	APBD		26 Persen	217.500.000
1.1.02.01.1.1.02.16.	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN	Persentase Masyarakat Miskin yang mempunyai jaminan kesehatan		100 Persen	147.659.895.027,00			100 Persen	213.209.541.573,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.16.001.	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	88 Persen	486.600.392	APBD		90 Persen	182.804.400
1.1.02.01.1.1.02.16.002.	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	100 Persen	8.803.601.635	APBD		100 Persen	11.832.000.000
1.1.02.01.1.1.02.16.004.	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah kedalam Program JKN	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis,	90 Persen	138.369.693.000	APBD		93 Persen	201.194.737.173
1.1.02.01.1.1.02.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Capaian Indikator Kinerja FCTL sesuai standar; Persentase FKTP sesuai standar; Persentase		45 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 65 Persen;	5.199.286.008,00			55 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen;	7.808.006.363,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.17.001.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	RSUD Bangkinang, RSUD Indrasari Rengat, RSUD Bengkalis, RSUD Kec. Mandau Duri, RSUD Raja Musa Sungai Guntung, RSUD T. Sulung Reteh P. Kijang, RSUD Selasih Pelalawan, RSUD Rokan Hulu, RSUD Dr. RM.Pratomo, RSUD Siak, RSUD Teluk Kuantan, RSUD Kep. Meranti, RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan, RS Petala Bumi, RS Lanud Roesmin Nurjadin, RS Bhayangkara Polda PKU, RS Rumkit TK IV Pekanbaru, RSUD Kota Dumai	50 Persen	115.897.300	APBD		55 Persen	181.834.176
1.1.02.01.1.1.02.17.003.	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Persentasi Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	Kota Pekanbaru	50 Persen	825.000.000	APBD		52 Persen	939.534.750

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.17.004.	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	RSUD Bangkinang, RSUD Indrasari Rengat, RSUD Bengkalis, RSUD Kec. Mandau Duri, RSUD Raja Musa Sungai Guntung, RSUD T. Sulung Reteh P. Kijang, RSUD Selasih Pelalawan, RSUD Rokan Hulu, RSUD Dr. RM.Pratomo , RSUD Siak, RSUD Teluk Kuantan, RSUD Kep. Meranti, RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan, RS Petala Bumi, RS Lanud Roesmin Nurjadin , RS Bhayangkara Polda PKU, RS Rumkit TK IV Pekanbaru, RSUD Kota Dumai	100 Persen	218.800.000	APBD		100 Persen	304.137.500
1.1.02.01.1.1.02.17.005.	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Persentase RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	RSUD Bangkinang, RSUD Indrasari Rengat, RSUD Bengkalis, RSUD Kec. Mandau Duri, RSUD Raja Musa Sungai Guntung, RSUD T. Sulung Reteh P. Kijang, RSUD Selasih Pelalawan, RSUD Rokan Hulu, RSUD Dr. RM.Pratomo , RSUD Siak, RSUD Teluk Kuantan, RSUD Kep. Meranti, RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan, RS Petala Bumi, RS Lanud Roesmin Nurjadin , RS Bhayangkara Polda PKU, RS Rumkit TK IV Pekanbaru, RSUD Kota Dumai	88 Persen	72.156.000	APBD		90 Persen	196.411.200

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.17.007.	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	RSUD Bangkinang, RSUD Indrasari Rengat, RSUD Bengkalis, RSUD	100 Persen	74.736.000	APBD		100 Persen	118.320.000
1.1.02.01.1.1.02.17.009.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	25 Persen	43.484.000	APBD		35 Persen	207.060.000
1.1.02.01.1.1.02.17.015.	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	100 Persen	219.635.281	APBD		100 Persen	370.896.400
1.1.02.01.1.1.02.17.016.	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan management krisis kesehatan	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	100 Persen	281.879.994	APBD		100 Persen	207.060.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.17.017.	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis kesehatan	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	65 Persen	117.112.000	APBD		75 Persen	225.305.320
1.1.02.01.1.1.02.17.019.	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	260.810.000	APBD		1 Dokumen	529.993.125
1.1.02.01.1.1.02.17.024.	Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	Kota Pekanbaru	100 Persen	344.307.500	APBD		100 Persen	126.150.000
1.1.02.01.1.1.02.17.026.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	Kota Pekanbaru	100 Persen	632.670.000	APBD		100 Persen	971.659.500
1.1.02.01.1.1.02.17.029.	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Klinis dan Lingkungan	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar	Kota Pekanbaru	50 Persen	297.825.000	APBD		55 Persen	323.884.680
1.1.02.01.1.1.02.17.030.	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Klinis	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	Kota Pekanbaru	100 Persen	725.000.000	APBD		100 Persen	838.566.900
1.1.02.01.1.1.02.17.032.	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	Kota Pekanbaru	100 Persen	969.972.933	APBD		100 Persen	2.267.192.812

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.18.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase ODHA yang diobati; Success Rate TB Paru; Annual Parasit Indeks (API) ; Persentase capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi usia 0-11 bulan; Persentase Kab/Kota yang merespon Alert sinyal kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (KLB) > 80%; Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai		28 Persen; 90 Persen;	1.190.000.000,00			33 Persen; 95 Persen;	1.699.249.881,00
1.1.02.01.1.1.02.18.001.	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis,	23 Persen	100.000.000	APBD		24 Persen	215.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.004.	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Succes Rate TB	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	90 Persen	100.000.000	APBD		90 Persen	245.775.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.18.008.	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	90 Persen	205.761.600	APBD		92 Persen	174.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.010.	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Persentase Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk & < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Duma	60 Persen	85.893.600	APBD		70 Persen	86.120.000
1.1.02.01.1.1.02.18.014.	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Duma	94 Persen	100.000.000	APBD		96 Persen	241.118.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.18.015.	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Duma	100 Persen	211.232.000	APBD		100 Persen	209.882.000
1.1.02.01.1.1.02.18.018.	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis,	100 Persen	97.112.800	APBD		100 Persen	159.904.881
1.1.02.01.1.1.02.18.020.	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Duma	70 Persen	100.000.000	APBD		72 Persen	117.450.000
1.1.02.01.1.1.02.18.028.	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	70 Persen	190.000.000	APBD		80 Persen	250.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.19.	PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES	Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar; Persentase ketersediaan obat,vaksin dan logistik ;		56 Persen; 58 Persen; 99 Pesren;	4.250.822.938,00			61 Persen; 60 Persen; 100 Persen;	4.260.617.754,00
1.1.02.01.1.1.02.19.002.	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	75 Persen	56.857.500	APBD		80 Persen	129.550.000
1.1.02.01.1.1.02.19.004.	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang dibina sesuai standar	Provinsi Riau	60 Persen	100.000.000	APBD		63 Persen	176.660.000
1.1.02.01.1.1.02.19.006.	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	Kota Pekanbaru	89 Persen	31.677.500	APBD		90 Persen	137.800.000
1.1.02.01.1.1.02.19.007.	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	86 Persen	2.667.120.000	APBD		88 Persen	725.500.000
1.1.02.01.1.1.02.19.008.	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	86 Persen	1.282.265.438	APBD		88 Persen	1.835.000.000
1.1.02.01.1.1.02.19.009.	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	61.460.000	APBD		1 Dokumen	235.550.000
1.1.02.01.1.1.02.19.010.	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standa	Kota Pekanbaru	100 Persen	27.075.000	APBD		100 Persen	516.168.877
1.1.02.01.1.1.02.19.011.	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT ; Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT ;	Kota Pekanbaru	85 Persen; 85 Persen;	24.367.500	APBD		90 Persen; 90 Persen;	504.388.877

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1.1.02.01.1.1.02.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar; Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar ;		100 Persen; 60 Persen;	6.826.052.090,00			100 Persen; 75 Persen;	10.359.562.892,00
1.1.02.01.1.1.02.20.003.	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	Kota Pekanbaru	100 Persen	52.284.839	APBD		100 Persen	150.000.000
1.1.02.01.1.1.02.20.005.	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, ppds/ppdgs)	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	Kota Pekanbaru	150 Orang	115.047.477	APBD		155 Orang	146.061.747
1.1.02.01.1.1.02.20.006.	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	Kota Pekanbaru	186 Orang	5.907.180.000	APBD		186 Orang	6.128.945.000
1.1.02.01.1.1.02.20.009.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	Kota Pekanbaru	30 % Persen	204.161.376	APBD		30 % Persen	1.045.750.753
1.1.02.01.1.1.02.20.015.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	Kota Pekanbaru	70 Orang	492.598.398	APBD		70 Orang	2.828.547.392
1.1.02.01.1.1.02.20.016.	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	Kota Pekanbaru	2 Buku	54.780.000	APBD		2 Buku	60.258.000
1.1.02.01.1.1.02.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar		67 Persen	60.234.938,00			70 Persen	257.509.580,00
1.1.02.01.1.1.02.21.002.	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	Kota Pekanbaru	100 Persen	60.234.938	APBD		100 Persen	257.509.580
JUMLAH					184.431.659.040,00			256.718.617.144,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Riau bertujuan mencapai Sasaran serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Keuangan dan Anggaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari harapan. Karena itu masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar dokumen rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan pembangunan.

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

- a. Masalah kesehatan yang dihadapi di Indonesia cukup beragam termasuk di Provinsi Riau
- b. Eliminasi TB harus menjadi perhatian, terutama pada kasus yang belum terdeteksi yang ada di Provinsi Riau
- c. Penanganan dan pencegahan Stunting atau masalah gizi buruk disebabkan banyak faktor. Tidak hanya kurangnya asupan gizi, termasuk faktor lingkungan, seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan budaya. Sehingga perlu intervensi secara sensitive dan spesifik dengan melibatkan lintas sektor terkait.
- d. Meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap.
- e. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam menghadapi penyakit yang berpotensi wabah/KLB.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada Renja Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Renja Dinas Kesehatan tahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang
- b) Renja Dinas Kesehatan tahun 2021 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator SPM dan SDGs.
- c) Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan.
- d) Renja Dinas Kesehatan tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBN. Dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya [RPJMN, RPJMD, RKPD dan RENSTRA Dinas Kesehatan]

5.3 Rencana tindak lanjut

Dari analisis kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau, berdasarkan indikator SPM dan Indikator Kinerja Utama, rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan peningkatan kemampuan petugas kesehatan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan
- b) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan termasuk pengelolaan kesehatan yang berbasis IT.
- c) Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset
- d) Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pekanbaru, Agustus 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU**



Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199102 2 001

TABEL VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	TABEL	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
				Sesuai	Perbaiki	
1	2	3	4	5	6	7
1	BAB I. PENDAHULUAN	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik				
	1.1 Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPd, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.			V	Narasi perlu di korekasi Halaman 1 dan 2
	1.2 Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.			V	<ul style="list-style-type: none"> • Update dasar hukum • Dasar hukum yang tidak berkaitan langsung agar di hapus saja

	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.				V	• Halaman 5 : Tujuan → Pada point d, agar di koreksi
	1.4 Sistematis Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.			V		-
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU						
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	<p>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keeluaran yang direncanakan; 	T-C.29		V	Perlu perbaikan.	
						V	1. Perlu perbaikan narasi dan analisa

	<p>2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</p> <p>3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</p> <p>4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;</p> <p>5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan</p> <p>6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.</p>			<p>2. Perlu perbaikan narasi dan analisa</p> <p>3. Perlu perbaikan narasi dan analisa</p> <p>4. Ada, namun perlu perbaikan, dan dipertajam faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau yang melebihi target.</p> <p>5. Perlu perbaikan terkait implikasi terkait pencapaian program dan kegiatan</p> <p>6. Perlu perbaikan terkait kebijakan/tindakan perencanaan.</p> <p>Hal. 18- 33 Capaian program agar di cek kembali terkait narasi maupun target pencapaian</p>
			V	
			V	
			V	
			V	
			V	
			V	
			V	
			V	
			V	
			V	

	<p>7. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.29</p>			<p>7. Ada, namun tabel T-C.29 tidak sesuai Format</p>
<p>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p>	<p>Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.</p> <p>Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.</p>	<p>T-C.30</p>	<p>V</p>	<p>Hal. 45, perlu perbaikan terkait dasar hukum dan Tabel C.30 agar di perbaiki (agar di isi yang terkait pencapaian SPM dan IKK</p>

<p>2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</p>	<p>Berisikan uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; 2. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat; 3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 			<p>V</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tergambarakan sejauhmana dan koordinasi program sinergi dengan daerah dan Kab/Kota dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat pusat. 2. Perlu koreksi terkait permasalahan dan hambatan pada halaman 48 perlu di urut berdasarkan prioritas. 3. Ada, namun perlu dikoreksi narasi terkait capaian program dengan pencapaian visi, misi, SPM dan SDGs, dll. 4. Belum ada, perlu ditambahkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.
--	---	--	--	----------	---

		<p>langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).</p> <p>Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32. 				V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek kembali narasi, terkait penelaah usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat 2. Belum tergambar keterkaitan usulan program dari kelompok masyarakat kesehatan masyarakat dengan penting bidang kesehatan.
3.	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH						
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu					V	Agar di cek kembali narasi keterkaitan

		penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.				terkait telaah terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.		V	Perlu di koreksi beberapa narasi terkait tujuan dan saranan perangkat daerah dan sesuai dengan target kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan		
3.3 Program dan Kegiatan	Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: - Pencapaian visi dan misi kepala daerah, - Pencapaian SDGs, - Pengentasan kemiskinan, - Pencapaian NSPK dan SPM, - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, - Pengembangan daerah terisolir, - Dsb.	T-C.33	V	a. Program dan kegiatan perlu diperhatikan khusus terkait pencapaian visi dan misi Kepala daerah, pencapaian SPM, SDGs dan prioritas Nasional.		

		<p>b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program dan jumlah kegiatan. - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. <p>c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.</p> <p>d. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.33</p>		V		V	<p>b. -</p> <p>c. Agar di buat narasi terkait kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.</p> <p>d. -</p>
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					V	<p>Belum ada dalam dokumen (Diambil dari sistem i-Planning pada tahapan Final RKPD)</p>
		Diambil dari sistem i-Planning pada tahapan Final RKPD					

<p>5</p> <p>BAB V. PENUTUP</p>	<p>Berisikan uraian penutup, berupa:</p> <p>a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.</p> <p>c. Rencana tindak lanjut.</p> <p>Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p>	<p>a. Perlu koreksi narasi dan diuraikan catatan penting berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Riau</p> <p>b. -</p> <p>c. -</p> <p>Agar di lampirkan : Berita Acara Pemetaan berdasarkan Permendagri No. 90 tahun 2019</p>

Mengetahui,
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappedalitbang Provinsi Riau


HERI YANTO, S. Hut., MT
Pembina Tk. I

NIP. 19711126 199803 1 006


Verifikator,

MEIRINCE, SKM, M. Kes
Pembina
19640509 198703 2 003

**TABEL VERIFIKASI
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021**

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	TABEL	HASIL VERIFIKASI		
				<u>Sesuai</u>	Perbaiki	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	BAB I. PENDAHULUAN	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.				
	1.1 Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.		√		

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

√

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

√

1.4 Penulisan

Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) T-C.29 terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu

√

Tahun Lalu dan

(tahun n-2) dan perkiraan capaian

**Capaian Renstra
Perangkat Daerah**

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

		<p>2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</p> <p>3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</p> <p>4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;</p> <p>5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan</p> <p>6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.</p> <p>7. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.29</p>				
	<p>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p>	<p>Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang</p>	T-C.30	√		

		<p>sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.</p> <p>Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.				
	<p>2.3 Isu-isu Penting</p> <p>Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</p>	<p>Berisikan uraian mengenai:</p> <p>1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;</p> <p>Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat;</p> <p>2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable</p>		√		

		<p>Development Goals);</p> <p>4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan</p> <p>5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.</p>				
	<p>2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD</p>	<p>Berisikan uraian mengenai:</p> <p>1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;</p> <p>2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;</p> <p>3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan</p>	T-C.31	√		

		<p>kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan</p> <p>4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31.</p>				
	<p>2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</p>	<p>Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).</p>	T-C.32	√		

		<p>Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32. 				
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	<p>Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.</p>		√		

**3.2 Tujuan dan Sasaran
Renja Perangkat
Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

√

fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**3.3 Program dan
Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai: T-C.33

√

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Pencapaian SDGs,

Pengentasan kemiskinan,

Pencapaian NSPK dan SPM,

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

Pengembangan daerah terisolir,

Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

		<p>Jumlah program dan jumlah kegiatan.</p> <p>Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).</p> <p>Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.</p> <p>c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.</p> <p>d. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.33</p>				
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
		Diambil dari sistem i-Planning pada tahapan Final RKPD		√		

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
Sekretaris

NINNO WASTIKASARI, SE.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741117 199803 2 003

Kasubbag Perencanaan

ACHMAD JAJULI, SKM.MKM
Pembina
NIP. 19740301 199403 1 003

Pekanbaru, Agustus 2020

Mengetahui:
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEADALITBANG PROVINSI RIAU

HERI YANTO. S. Hut. MT
Pembina TK.I
NIP. 19711126 199803 1 006

Verifikator 1
Kasubbid Kesehatan & KB

DESMIL FANENI, S. Si
Penata Tk. I
NIP. 19731223 200501 2 003

Verifikator 2

Meirince, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19640509 198703 2 003

**HASIL KESEPAKATAN PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan Rapat Pemetaan Program dan Kegiatan menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN Berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

Hasil pembahasan dari seluruh peserta Rapat Pemetaan Program dan Kegiatan menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa / 18 Febrwari 2020
Hari dan Tanggal : Selasa / 18 Februari 2020
Jam : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappedalitbang Provinsi Riau

Rapat Pemetaan Program dan Kegiatan menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah :

MENYEPAKATI:

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi yang disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya kegiatan yang belum terpetakan akan dibahas lebih lanjut.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.m. KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 18 Februari 2020
a.n. DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
Sekretaris Dimas Kesehatan


NINNO WASTIKASARI, SE, M.Si
Pembina (IV/a) (IV/a)
NIP. 197407171998032003 003

a.m. KEPALA BAPPEDALITBANG
PROVINSI RIAU
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU


DESMIL FANENI, S.Si
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19731223 200501 2003

PERMINDAGRI 96/2019											
KODE	BIDANG URUSAN	KOBERTASI (Diat dari l-planning)	PROGRAM (Dius dari RPMD)	KEGIATAN (Diat dari Konstr)	KODE/HEKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PERANGKAT DAFTAR PERAL	
1	URUSAN BIDANG URUSAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX	PENUNJANG URUSAN	0.000.03.001.		Pengadaan Paketan Dinas Beesra	X.XX.01.1.04.02			Pengadaan Paketan Dinas Beesra			
X.XX	PENUNJANG URUSAN	0.000.03.002.		Perangkatannya	X.XX.01.1.04.03			Perangkatannya			
X.XX	PENUNJANG URUSAN	0.000.03.003.		Pengadaan Paketan Kerja Lapangan	X.XX.01.1.04.05			Pengadaan Paketan Kerja Lapangan			
1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Terentu				Terentu			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN										
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESIHATAN MASYARAKAT		1.02.02	PROGRAM PEMASUHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT					
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.023.			1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rajukan, UKM dan UKM Rajukan Tingkat Daerah Provinsi				
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.024.		Pembinaan Pengendalian Lambat medis Fasilitas Yankes	1.02.02.02.08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.025.		Pembinaan kesehatan olahraga pada Fasilitas Yankes	1.02.02.1.02.07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
1.02	KESIHATAN			Pembinaan kesehatan kerja pada Fasilitas Yankes	1.02.02.1.02.07						
1.02	KESIHATAN				1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESIHATAN					
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.027.		Pembinaan (USRB) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	1.02.05.1.03.01		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Superlati UKBM			
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.029.		Penyektarian dan Pengembangan Informasi Kesehatan	1.02.05.1.02.01		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promosi Perorot Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Promosi Kesehatan Hidup Bersih dan Sehat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		DINAS KESIHATAN	
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.030.		Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1.02.05.1.02						
1.02	KESIHATAN				1.02.02.1.02						
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.034.		Pembinaan dalam Feeding dan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersih yang memenuhi Standar	1.02.02.1.02.03		Pengediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rajukan, UKM dan UKM Rajukan Tingkat Daerah Provinsi				
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.036.		Pembinaan dalam Pengendalian Pelayanan Kesehatan lanjut usia	1.02.02.1.02.05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.039.		Pembinaan dalam Pengendalian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC)	1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.042.		Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kesehatan Neonatus dan Bayi	1.02.02.1.02.05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.043.		Pembinaan dan Peningkatan Stunting	1.02.02.1.02.06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.044.		Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Kemala Putri	1.02.02.1.02.06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.045.		Pengembangan Kinerja SDM Pengelola Gizi	1.02.02.1.02.06						
1.02	KESIHATAN	1.01.02.01.1.1.02.15.046.		Pembinaan Surveillance Gizi	1.02.02.1.02.17			Pengelolaan Surveillance Kesehatan			

PEREMENDAGRI 96/2019																			
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
			DOKUMEN YANG MASUK BERAKU (RPJMD DAN REGISTRASI)		PROGRAM (Disisi dari RPJMD)		KECIYATAN (Disisi dari RKSesra)		KODEBIKESI		PROGRAM		KECIYATAN		SUB KECIYATAN		KETERANGAN		
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.009.				Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	1.02.02.1.02.10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.010.				Pembinaan koprerawara kesehatan Masyarakat (Peternakan) di Provinsi Riau	1.02.02.1.02.19				Pembinaan Paklaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.012.				Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	1.02.02.1.02.19				Pembinaan Paklaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.013.				Pembinaan registrasi dan Pertizhan RFTP di Provinsi Riau	1.02.02.1.02.20				Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas Untuk Registrasi Puskesmas								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.014.				Pembinaan Puskesmas FONEP tingkat Provinsi Riau	1.02.02.1.02.19				Pembinaan Paklaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.015.				Pembinaan Mutu & Akreditasi FRTF di Provinsi Riau	1.02.02.1.04.03				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.016.				Manajemen penanganan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	1.02.03.1.02.01				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
							1.02.03				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia								
							1.02.03.1.02				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.017.				Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	1.02.03.1.02.01				Peningkatan kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.018.				Pemenuhan Perintah Penanggulangan Krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	1.02.02.1.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.019.					1.02.02												
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.020.				Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	1.02.02.1.02				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UMR Rutjen, UKM dan UKM Rutjenan Tingkat Daerah Provinsi								
							1.02.02.1.02.19				Pembinaan Paklaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan								
							1.02.02.1.03				Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.021.				Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	1.02.02.1.03.01				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan								
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.022.				Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	1.02.02.1.03.01				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan								
							1.02.03.1.02				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
							1.02.03.1.02.01				Peningkatan kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN	DOKUMEN YANG MASIH BERLAKU (RPJMD DAN RENSTRA)				PERMENDAGRI 90/2019						PERANGKAT DAERAH PEL
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (DHSI dari i-Planning)	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	KEGIATAN (Diisi dari Renstra)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					DINAS KESEHATAN
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.025.		Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.1.03.02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.026.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1.02.02.1.03.02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.027.		Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	1.02.02.1.03.01			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
1.02	KESEHATAN				1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					DINAS KESEHATAN
1.02	KESEHATAN				1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.029.		Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Klinis dan Lingkungan	1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					DINAS KESEHATAN
					1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.030.		Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Klinis	1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.031.		Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat Pelayanan Laboratorium Klinis	1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.032.		Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Lingkungan	1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.033.		Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat Pelayanan Laboratorium Lingkungan	1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.035.		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)					Nonemkatur tidak ada		
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.17.011.			1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
				Pembinaan Pelayanan Kesehatan Untuk Puskesmas di Daerah Destinasi Wisata	1.02.02.1.02.15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.18.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					DINAS KESEHATAN
1.02	KESEHATAN				1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.18.001.		Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	1.02.02.1.02.18			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.18.002.		Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
1.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.1.02.18.004.		Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	1.02.02.1.02.18			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota			

PERMUDA 2019										
KODE / BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE/KEKAS (Dibuat dari I-Planning)	PROGRAM (Dibuat dari RPMD)	KEGIATAN (Dibuat dari Rensstra)	KODE/KEKAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	PEMANGKAT DAERAH PELAKSANA
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.007		Pembinaan dan Penguasaan Program Malaria	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.008		Pembinaan dan Penguasaan Program Imunisasi Dasar	1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.009		Pembinaan dan Penguasaan Program Imunisasi Lanjutan	1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.010		Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	1.02.02.1.02.21			Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.014		Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan	1.02.02.1.02.12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.015		Haji	1.02.02.1.02.12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.016		Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarbekas Haji Riau	1.02.02.1.02.12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.018		Surveilans Kesehatan	1.02.02.1.02.17			Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.018		Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	1.02.02.1.02.02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Keadaan Luar Biasa (DLB)		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.020		Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.021		Pengendalian kasus zoonosis	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.022		Pembinaan dan Penguasaan Pengendalian Penyakit DBD	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.023		Pembinaan dan Penguasaan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.024		Pembinaan dan Penguasaan Program Diare	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.025		Pembinaan dan Penguasaan Program Hepatitis Virus	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.026		Pembinaan dan Penguasaan Pengendalian Kasus Kecelakaan	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.027		Pembinaan dan Penguasaan Program Kusta dan Pambusia	1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.028		Pembinaan dan Penguasaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.18.029		Pembinaan dan Penguasaan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria dan Tidak Malaria		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.19.003		PROGRAM PELAYANAN KEPARAFARMASIAN DAN ALKES	1.02.02.1.02.14			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.19.001		Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penggunaan NAPZA di Provinsi Riau	1.02.02.1.02.19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.19.002		Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	1.02.02.1.02.19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.19.003		Pembinaan SDH yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	1.02.03.1.02			Pengembangan Mita dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
1.02	KESHAHATAN	1.01.02.01.1.102.19.003		Pembinaan SDH yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	1.02.03.1.02.21			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		

PERMENDAGRI 90/2019										
KODE URUSAN/URUSAN (URUSAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODIFIKASI (Dist dari 1-Pemdir)	PROGRAM (Dist dari RPMD)	KEGIATAN (Dist dari Renstra)	KODIFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SIBU KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.19.004		Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	1.02.04.1.01.01	PROGRAM SIPILAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Pengikutan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang peyatuur Alat Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengikutan PBF Cabang dan Cabang Pak		DINAS KESEHATAN
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.19.006		Pembinaan pemerintahan ketersediaan dan kecukupan perbekalan alkes se Provinsi Riau/keseluruhan.	1.02.02.1.02.19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.19.007		Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BMDP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	1.02.02.1.01.10		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Output kegiatan termasuk pemenuhan kebutuhan obat tidak terdapat subkegiatan pada Permenagri No 90	
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.19.008		Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	1.02.02.1.01.21		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.19.009		Pemenuhan rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	1.02.02.1.01.10		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.19.010		Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	1.02.02.1.02.19		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.19.011		Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	1.02.02.1.03.02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.20	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYALINGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.20.002		Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdnk, data pembul, ns, WKSS)	1.02.03.1.01.01		Pengembangan Muta dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
.02	KESEHATAN	1.01.02.01.1.02.20.002		Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdnk, data pembul, ns, WKSS)	1.02.03.1.01.01		Pengembangan Muta dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE URUSAN /BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN /BIDANG PEMERINTAHAN	KODIFIKASI (Dulu dari +Planning)	PROGRAM (Dulu dari R/PMD)	KEGIATAN (Dulu dari R/PMD)	KODIFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PELAKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1.02.02.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Penilaian Laboratorium Kesehatan		

DOKUMEN YANG MASIH BERLAKU (R/PMD DAN R/ASTRA)

PEMENDAGRI 99/2019

Kepala Sub Bidang Kesehatan dan
Keperawatan
Bappeda Kabupaten Prohloro Waluyo

DESMIL JANENI, S.Si
NIP. 1973123200501 2 003

Pekalongan, Februari 2020
An Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris

MISMO WASTIKASARI, SE, M.Si
NIP. 19741117199003 2 003

